



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025 - 2029. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Dinas Kesehatan Kota Jambi merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

Demikian Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi, Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA JAMBI**



Fahmi, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196702051998031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan

rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya keberadaan Renstra Perangkat Daerah harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan bidang kesehatan Kota Jambi. Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi disusun dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukung adanya pelayanan prima hal ini tercantum dalam tujuan pembangunan kota jambi yaitu “Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing” untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan peran dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan yang meliputi; upaya pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, promosi kesehatan, penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045.
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan kota jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025-2029 sebagai sebuah dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis karena menterjemahkan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kedalam rencana, program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;
- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 penyajian Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam BAB Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran layanannya.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.6. Identifikasi Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang tercantum dalam tabel 2.1

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini berisi langkah-langkah/ upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya dan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban : membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan yang meliputi; upaya pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, promosi kesehatan, penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan Sumber daya kesehatan
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) bidang.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi keadaan seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dan hukum di bidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian tugas dan pemberian dukungan administrasi dan hukum kepada seluruh unsur organisasi di bidang kesehatan;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kesehatan;
- e. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. pengelolaan informasi bidang kesehatan
- g. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, perlengkapan, akuntansi, verifikasi, tindakan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari;

1. Sub. Bagian Program, Informasi dan Humas;
2. Sub. Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Sub. Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari;

- 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, terdiri dari;

- 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular;
- 3. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari;

- 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, PKRT dan sarana prasarana Kes serta sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari;

1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan, PKRT, Sarana dan Prasarana kesehatan
3. Seksi SDM Kesehatan

UPTD, terdiri dari ;

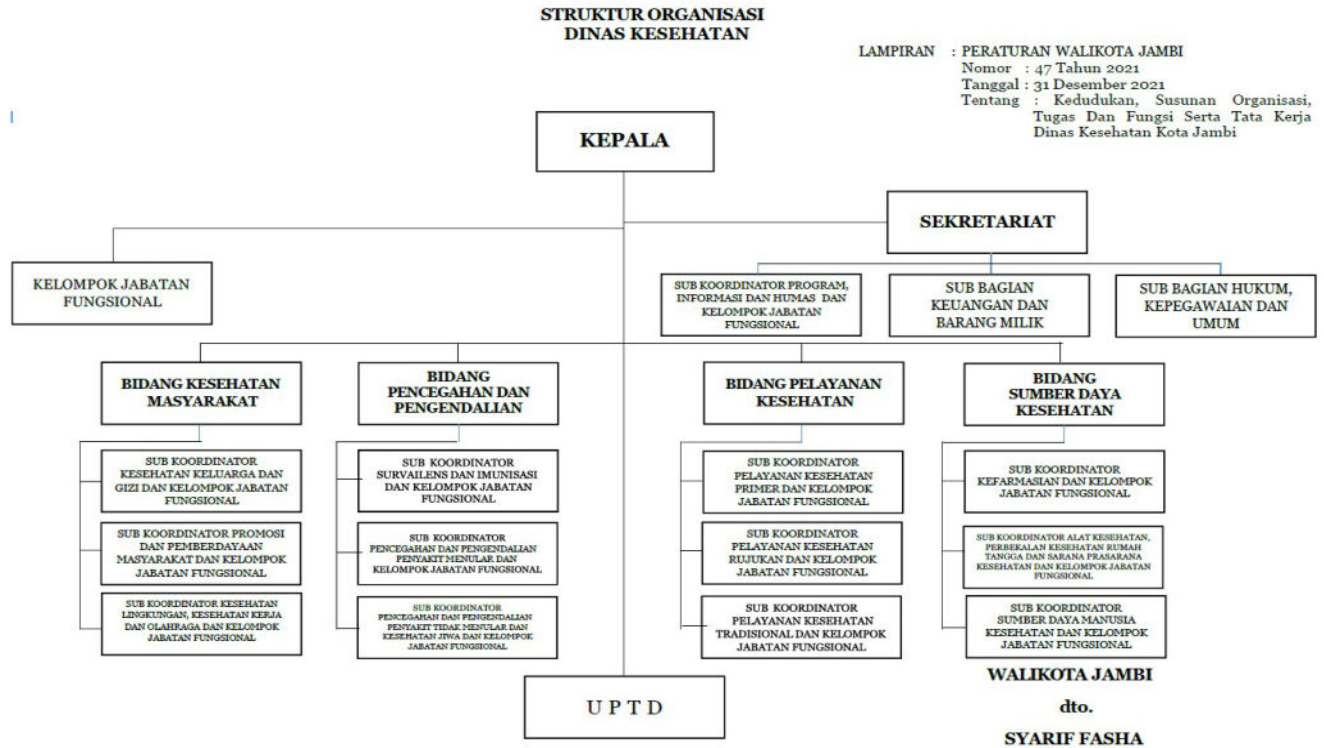
1. Instalasi Farmasi;
2. Puskesmas
3. Puskesmas Pembantu
4. Rumah Sakit Daerah
5. Laboratorium Kesehatan Daerah
6. PSC 119

Kelompok Jabatan Fungsional

1) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1



2) Tata Kerja

1. Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan.
2. Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
3. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Kepala Dinas, sekretaris, kepala sub bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta

melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 76 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pejabat struktural 8 Orang, pejabat fungsional pengawasan sebanyak 13 Orang, pejabat fungsional tertentu 25 orang, dan pejabat fungsional umum 30 Orang. Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam beberapa jabatan, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin seperti terlihat di tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Susunan PNS Dinas Kesehatan Kota Jambi
Berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SMA	D III	S1/D IV	S2	Perempuan	Laki-laki
1.	Struktural									
	a. Eselon II	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	b. Eselon III	-	-	5	-	-	-	5	3	2
	c. Eselon IV	-	2	-	-	-	2	-	1	1
2.	Fungsional Pengawas	-	13	-	-	-	8	5	9	4
3.	Fungsional Tertentu	-	20	5	-	-	20	5	15	10
4.	Fungsional Umum	-	30	-	1	5	24	-	18	12
	Jumlah	0	65	11	1	5	54	16	47	29

Sumber data Dinas Kesehatan Kota Jambi Februari 2025

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa dari PNS (76 orang) pada Dinas Kesehatan sebagian besar berada pada golongan III sebesar 85,52% (65 orang) dan sisanya golongan IV sebesar 14,47% (11 orang). Berdasarkan

tingkat pendidikan terakhir Strata I sebesar 71,05% (54 orang), Strata II sebesar 21,05% (16 orang), SMA 1,31% (1 orang), dan Diploma III 6,57% (5 orang). Dan berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di Dinas Kesehatan sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebesar 61,84% (46 orang) dan sisanya laki-laki sebesar 38,15% (29 orang).

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Jambi menempati 3 (tiga) unit sarana gedung, diantaranya :

- a) Gedung Dinas Kesehatan Jalan H Agus Salim, yang ditempati untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Bidang (Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian dan Pencegahan penyakit, bidang Sumber daya Kesehatan).
- b) Instalasi Farmasi Jalan Zainir Havis Kotabaru.
- c) Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi Jalan H. Agus Salim.

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan upaya kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, baik yang ada pada kantor Dinas kesehatan maupun pada UPTD tahun 2024 diantaranya:

Tabel.2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota
Jambi

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2024	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	68	6,236,281,800.00
1	TANAH	68	6,236,281,800.00
	PERALATAN DAN MESIN	24,365	452,114,735,767.79
1	ALAT BESAR	71	5,018,900,618.00
2	ALAT ANGKUTAN	281	21,654,622,123.25
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	36	306,303,985.00
4	ALAT PERTANIAN	5	388,450,000.00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	11,786	50,060,754,415.79
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	516	4,412,624,084.50

7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9,514	315,265,125,868.23
8	ALAT LABORATORIUM	1,027	37,326,767,946.59
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	1,129	17,353,217,175.00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	279,977,591.43
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	47,991,960.00
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	577	393,384,593,406.77
01	BANGUNAN GEDUNG	575	392,768,319,156.77
02	MONUMEN	-	-
03	BANGUNAN MENARA	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	616,274,250.00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	107	28,072,833,964.08
01	JALAN DAN JEMBATAN	2	2,657,141,084.91
02	BANGUNAN AIR	15	533,730,000.00
03	INSTALASI	29	19,519,513,049.17
04	JARINGAN	61	5,362,449,830.00
	ASET TETAP LAINNYA	1,322	242,550,800.00
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	104	37,593,400.00
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	61	80,639,250.00
03	HEWAN	-	-
04	BIOTA PERAIRAN	-	-
05	TANAMAN	1,157	124,318,150.00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-

07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	1,522	10,071,451,073.45
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
02	ASET TIDAK BERWUJUD	16	571,614,500.00
03	ASET LAIN-LAIN	1,506	9,499,836,573.45
	JUMLAH TOTAL	27,961	890,122,446,812.09

Sumber data Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun Februari 2025

2. Sarana dan Prasarana Publik

Sarana publik untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan meliputi :

- a) Rumah Sakit Umum Daerah : 2 unit
- b) Puskesmas Non Perawatan : 16 Unit
- c) Puskesmas Perawatan : 4 Unit
- d) Puskesmas Pembantu : 37 Unit
- e) Poskesdes : 2 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Jambi

Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kota Jambi berdasarkan Indikator kinerja Utama OPD dan Kinerja Standar pelayanan Minimal (SPM).

2.3.1. Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Indikator kinerja Utama Dinas kesehatan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi selama tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.5
Capaian Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Utama OPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3			4		
1	Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin kesehatannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang terakreditasi	100%	100%	100%	85%	92%	100%
3	Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas	40%	50%	60%	42%	61%	72%
4	Menurunkan Jumlah Kasus Kematian ibu melahirkan	0	0	0	6	4	4
5	Menurunkan Jumlah Kasus Kematian bayi baru lahir	0	0	0	4	6	35
6	Menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Sasaran ini merupakan indikator yang diambil dari indikator yang menunjang indikator RPJMD Kota Jambi Maupun indikator Kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin pelayanan kesehatannya

Masyarakat yang diajmin pelayanan kesehatannya adalah jumlah masyarakat ke fasillitas kesehatan yang pertama kali dalam rangka mencari pelayanan kesehatan baik yang bersifat kunjungan kuratif, kunjungan preventif maupun kunjungan promotif yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

2. Persentase Puskesmas terakreditasi

Puskesmas terakreditasi adalah puskesmas yang telah dibina dalam peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistim manajemen, sistim manajemen mutu, sistim penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen resiko

Capaian realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 sudah mencapai target yakni Persentase Puskesmas yang terakreditasi target 100% capaian 100%.

3. Menurunkan angka penyakit menular dan tidak menular

Menurunkan angka penyakit menular dan tidak menular adalah bagaimana tindakan program dalam menurunkan angka penyakit menular dan tidak menular dengan melakukan pengendalian dengan tindakan pencegahan terjadinya penyakit dan mengendalikan penyakit dengan melakukan pengobatan lengkap agar penyakit tidak menjadi wabah

4. Jumlah kasus kematian ibu melahirkan

Kematian ibu melahirkan yang dimaksudkan adalah kematian ibu karena gangguan kehamilan atau penanganannya (bukan karena kecelakaan atau kasus insidental) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Kasus kematian ibu melahirkan dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi Fluktuatif , jumlah kematian ibu yang terjadi setiap tahunnya masih dibawah target nasional, Meskipun realisasi AKB ini masih dibawah target yang ditetapkan dalam SDGs, sebesar 102 per 100.000 KH, namun tetap perlu diwaspadai karena 1 kematian saja rasio angka kematiannya naik cukup signifikan. Diupayakan untuk dilakukan intervensi sehingga meminimalkan kejadian kematian ibu.

5. Jumlah Kasus kematian bayi

Angka kematian bayi per 1.000 KH. Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Meskipun realisasi capaian masih jauh dibawah target nasional, tetapi perlu ada kewaspadaan dan peningkatan upaya pencegahan dari seluruh pihak terkait, karena bila dilihat dari grafiknya terlihat adanya fluktuatif dari tahun 2021 ke tahun 2023. Angka kematian bayi meningkat dari thn lalu, krn thn ini semua faskes melaporkan kematian bayi melalui aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) dan menjadi syarat penilaian Akreditasi. Hal ini perlu diwaspadai agar capaian di tahun berikutnya tidak melampaui target SDGs.

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Indikator kinerja Dimensi Standar Pelayanan minimal. Capaian kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Jambi selama tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4
Capaian Kinerja SPM
Dinas Kesehatan Kota Jambi

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN							
KOTA JAMBI TAHUN 2020-2024							
NO	NAMA INDIKATOR	TARGET	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	100%	98.46	100.00	98.46	92.73	98.89
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	100%	87.45	100.00	87.45	97.88	99.09
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	90.76	100.00	90.76	100	99.6
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	20.47	100.00	88.00	100	96.21
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100.00	9.11	90.00	95.46	98.31
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	28.94	100.00	81.00	92.12	82.8
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	42.53	100.00	96.00	100	100
8	Pelayanan penderita hipertensi	100%	50.27	92.03	80.00	81.82	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	45.70	84.09	75.00	94.66	95.39
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100.00	100.00	95.00	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	37.98	100.00	68.00	58.8	85.78
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	41.63	100.00	49.00	100	100

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan

2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan Kesehatan Usia lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan

skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

10. Pelayanan Kesehatan oramag dengan gangguan Jiwa (OGDJ) berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TBC)

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko tinggi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

2.3.3 Kinerja Keuangan OPD

Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Jambi selama tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71.354.180.400,00	63.179.951.836,56	88,54	62.266.841.336,73
4.1.02	Retribusi Daerah	1.841.120.000,00	3.506.065.808,00	190,43	2.257.164.299,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.513.060.400,00	59.673.886.028,56	85,85	60.009.677.037,73
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.354.180.400,00	63.179.951.836,56	88,54	62.266.841.336,73
	JUMLAH PENDAPATAN	71.354.180.400,00	63.179.951.836,56	88,54	62.266.841.336,73
5	BELANJA DAERAH	345.665.611.137,00	312.410.928.315,37	90,38	309.467.051.550,30
5.1	BELANJA OPERASI	287.788.161.515,00	257.916.045.028,45	89,62	229.559.108.965,30
5.1.01	Belanja Pegawai	172.877.119.409,00	164.220.725.995,45	94,99	150.593.047.872,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.011.042.106,00	92.829.955.314,00	81,42	78.012.861.093,05
5.1.05	Belanja Hibah	900.000.000,00	865.363.719,00	96,15	953.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	287.788.161.515,00	257.916.045.028,45	89,62	229.559.108.965,30
5.2	BELANJA MODAL	57.877.449.622,00	54.494.883.286,92	94,16	79.907.942.585,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.372.984.333,00	43.472.189.986,92	93,74	70.689.453.645,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.985.469.789,00	9.611.739.300,00	96,26	7.655.158.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	1.518.995.500,00	1.410.954.000,00	92,89	1.563.330.090,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	57.877.449.622,00	54.494.883.286,92	94,16	79.907.942.585,00
	JUMLAH BELANJA	345.665.611.137,00	312.410.928.315,37	90,38	309.467.051.550,30
	SURPLUS/DEFISIT	(274.311.430.737,00)	(249.230.976.478,81)	90,86	(247.200.210.213,57)

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh Dinas Kesehatan adalah masyarakat kota Jambi, dengan memfasilitasi semua urusan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi melalui UPTD yang bernaung dibawah struktur organisasi Dinas Kesehatan.

Pelayanan yang dilaksanakan mencakup pelayanan terhadap pemberian pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan bagi masyarakat yg kurang mampu dan peningkatan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan melalui proses akreditasi.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Memperhatikan perkembangan dan tantangan pembangunan kesehatan, permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan diantaranya adalah :

A. Permasalahan Internal

1. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu dan bayi yang cenderung fluktuatif, terkadang mengalami penurunan, tidak jarang juga justru mengalami peningkatan.

2. Prevalensi Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk di tahun 2024 memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun bukan berarti tidak lagi menjadi permasalahan, justru perlu untuk diwaspadai agar tidak mengalami peningkatan kembali, mengingat juga prevalensi gizi buruk menjadi indikator penting dalam pencapaian target RPJMD Kota Jambi

3. Angka kesakitan Penyakit Menular

Peningkatan sejumlah kasus kejadian penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan perlu mendapatkan perhatian serius, seperti HIV/AIDS, TB Paru, DBD, kusta dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

4. Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular

Trend penyakit yang berkembang akhir-akhir ini adalah semakin tingginya angka kejadian penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan, seperti kanker (Leukimia, Thalasemia, Kanker Serviks, Kanker Payudara), jantung koroner, gagal ginjal, diabetes mellitus dan hipertensi. Kebanyakan disebabkan karena perilaku masyarakat yang mengabaikan kesehatan.

5. Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang terpadu dan dapat mewadahi informasi sesuai perkembangan teknologi informasi, serta belum adanya masterplan (blueprint) sistem informasi. Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dirasakan akan sangat membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

B. Permasalahan Eksternal

1. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan.
2. Transisi epidemiologi penyakit cepat berubah

Adanya penyakit infeksi yang baru ataupun penyakit infeksi lama yang muncul kembali merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses evolusi alam, selain itu kemampuan mikroba patogen untuk mengubah dirinya, manusia dengan perubahan teknologi dan perilakunya juga memberikan peluang kepada mikroba untuk secara alamiah merekayasa dirinya secara genetik, perubahan iklim global juga turut campur dalam timbul dan berkembangnya penyakit baru ini.

Transisi epidemiologi yang dimaksud adalah perubahan distribusi dan faktor-faktor penyebab terkait yang melahirkan masalah epidemiologi yang baru. keadaan transisi epidemiologi ini ditandai dengan perubahan pola frekuensi penyakit. Transisi epidemiologi bermula dari suatu perubahan kompleks dalam pola kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit non infeksi (penyakit tidak menular) justru semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan berubahnya gaya hidup, sosial ekonomi dan meningkatnya umur harapan hidup yang berarti meningkatnya pola risiko timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi dan lain-lain.

3.2 Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi pada saat lima tahun mendatang adalah :

RUMUSAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang lebih lengkap dibandingkan daerah sekitar	Pravalensi stunting dan penyakit tertentu	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia	Persaingan tenaga kerja ditengah perkembangan iptek	Tantangan bonus demografi dan produktivitas tenaga kerja yang masih relative tertinggal	IPM tertinggi di Provinsi Jambi	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
	Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS					
	Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.					
	Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat					
	Angka Kematian ibu dan bayi					
	Kepesertaan jaminan kesehatan belum optimal					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tujuan dan sasaran acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Dinas Kesehatan Kota Jambi. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Kota Jambi dalam hal ini Sasaran yang terkait dengan bidang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Jambi menetapkan tujuan :

“ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat”

Dengan indikator tujuan : **Umur Harapan Hidup.**

B. Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*actionoriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran Dinas Kesehatan Kota Jambi 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya akses, kualitas layanan, kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
2. Peningkatan Kepesertaan Perlindungan Sosial

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Jambi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75.12	75.33	75.56	75.81	76.06	76.32	76.59	
		Meningkatnya akses, kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	10.3	9.38	8.75	8.13	8	6.88	6.5	
			Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	4	6	5	4	3	2	0	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	76	90	90	90	90	90	90	
			Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkolosis (Treatment Success Rate) (%)	81	90	90	90	90	90	90	
			Jumlah Kematian Bayi	36	30	28	26	24	22	20	
	Peningkatan Kepesertaan Perlindungan Sosial		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98.08	98.20	98.40	98.60	98.80	99	99.20	

4.2 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi

CASCADING DINKES		Realisasi	TARGET							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VISI	MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA									
MISI 1	PENGUATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA									
Tujuan RPJMD	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing									
Indikator Tujuan RPJMD	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,77	81,93	82,24	82,54	82,98	83,5	83,63	83,75	84
Sasaran RPJMD	Peningkatan Derajat Kesehatan									
Indikator Sasaran RPJMD	Umur Harapan hidup (UHH)	75,12	75,33	75,56	75,81	76,06	76,32	76,59	76,80	77,10
Tujuan Renstra (Dinkes)	Peningkatan Derajat Kesehatan									
Indikator Tujuan Renstra (Dinkes)	Umur Harapan hidup (UHH)	75,12	75,33	75,56	75,81	76,06	76,32	76,59	76,80	77,10
Sasaran Renstra (Dinkes)	Meningkatnya akses, kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata									
	Peningkatan Kepesertaan Perlindungan Sosial									
Indikator Sasaran Renstra (Dinkes)	1. Prevalensi Stunting	10,30	9,38	8,75	8,13	8,00	6,88	6,50	5,80	5,50
	2. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	87,2	90	90	90	90	90	90	90	90
	3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	80	80	81	82	83	85	86	88	90
	4. Jumlah Kematian Ibu	4	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
	5. Jumlah Kematian Balita	37	35	32	30	28	26	24	22	20
	6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98,08	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100
Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan Kota Jambi harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Penetapan strategi dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Strenghts – Opportunities Strategy* (SO), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness – Opportunities Strategy* (WO), yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strenghts – Threats Strategy* (ST), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4. *Weakness – Threats Strategy* (WT), yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

5.2 Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Strategi dan Kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA				
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan	Peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif dan berdaya saing	Pemenuhan Sarana, prasarana dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kompetensi	
			Pemenuhan akses pelayanan Kesehatan Ibu hamil, pelayanan kesehatan Bayi	
			Meningkatkan mutu penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
			Perluasan cakupan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait penyakit menular dan tidak menular	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawai
 - b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d) Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan
 - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - b) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Pelayanan Kesehatan
 - c) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi

HIV

- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - q) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - r) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - s) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - t) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - u) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - v) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - w) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - x) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - y) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - d) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- a) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

6. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

- a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

**TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Penurunan Prevelensi Stunting - Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses, kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata			Usia Harapan Hidup (UHH)		
					Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))		
					Jumlah Kematian Ibu		
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)		
					Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkolosis (Treatment Success Rate) (%)		
					Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.		
			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi			1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	

[illegible]

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

					Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Peningkatan Kepesertaan Perlindungan Sosial			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
					Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

*Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029*

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN													
													Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	72.35	73	258,000,000,000	73.5	275,010,901,000	74	278,344,514,000	74.5	281,344,514,000	75	284,344,514,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen akuntabilitas	8 Dokumen	8 Dokumen	300,000,000	8 Dokumen	700,000,000	8 Dokumen	700,000,000	8 Dokumen	700,000,000	8 Dokumen	700,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	4 Dokumen	350,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu			182,799,071,000		195,000,000,000		197,000,000,000		199,000,000,000		201,000,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10195 orang	10210 orang	181,389,071,000	10250 orang	193,000,000,000	10260	195,000,000,000	10260	197,000,000,000	10260	199,000,000,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

**Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029**

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai			300,000,000		2,150,000,000		2,150,000,000		2,150,000,000		2,150,000,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	2 unit	40,000,000	4 unit	150,000,000	4 unit	150,000,000	4 unit	150,000,000	4 unit	150,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan												
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas												
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	30 orang	150,000,000	40 orang	500,000,000	40 orang	500,000,000	40 orang	500,000,000	40 orang	500,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	40 orang	60,000,000	40 orang	250,000,000	40 orang	250,000,000	40 orang	250,000,000	40 orang	250,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30 orang	50,000,000	30 orang	250,000,000	30 orang	250,000,000	30 orang	250,000,000	30 orang	250,000,000	

**Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029**

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana			640,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000		1,150,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	125,000,000	2 paket	300,000,000	2 paket	300,000,000	2 paket	300,000,000	2 paket	300,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan												
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	115,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	400,000,000	12 Laporan	400,000,000	12 Laporan	400,000,000	12 Laporan	400,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan			850,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan												
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	25 unit	850,000,000	20 Unit	1,500,000,000	20 Unit	1,500,000,000	20 Unit	1,500,000,000	20 Unit	1,500,000,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan												
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												

**Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1,000,000,000	12 laporan	2,000,000,000	12 laporan	2,000,000,000	12 laporan	2,000,000,000	12 laporan	2,000,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	750,000,000	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,000,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik daerah dalam kondisi baik												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			250,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			500,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang Dipelihara												
Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud yang Dipelihara												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi												
Peningkatan Pelayanan BLUD		22	22	73,085,929,000	23	74,360,901,000	23	75,694,514,000	23	76,694,514,000	23	77,694,514,000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			73,085,929,000		74,360,901,000		75,694,514,000		76,694,514,000		77,694,514,000	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025 - 2029

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM Bidang Kesehatan	96.8	100	107,314,026,000	100	127,800,000,000	100	131,000,000,000	100	135,607,315,000	100	138,646,060,000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			11,514,026,000		24,350,000,000		14,450,000,000		15,475,000,000		15,475,000,000	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000												
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1	12,000,000,000		-		-		-	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun												
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun												
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar												
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	4	2,000,000,000	4	2,500,000,000	4	2,500,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan												
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2,000,000,000		2,000,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1,264,026,000		1,500,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit												
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	6,500,000,000	4 Paket	7,000,000,000	4 Paket	7,500,000,000	4 Paket	8,000,000,000	4 Paket	8,000,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas												
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan												
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	2 Paket	250,000,000	2 Paket	350,000,000	2 Paket	450,000,000	2 Paket	475,000,000	2 Paket	475,000,000	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025 - 2029

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 2. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 3. Prevalensi Obesitas > 18 tahun 4. Persentase lanjut usia yang mandiri 5. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun 6. Cakupan penemuan kasus TB			94,150,000,000		101,550,000,000		114,375,000,000		117,857,315,000		120,896,060,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11703	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11673	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11339	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		56679	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		88260	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		105737	450,000,000		600,000,000		800,000,000		950,000,000		950,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		75794	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		38059	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12834	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		923	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			650,000,000		800,000,000		1,000,000,000		1,212,315,000		1,251,060,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		19500	350,000,000		500,000,000		750,000,000		850,000,000		850,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025 - 2029

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	375,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			200,000,000		250,000,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			150,000,000		250,000,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan												
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	750,000,000	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	850,000,000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	26,500,000,000	1 Dokumen	28,000,000,000	1 Dokumen	30,000,000,000	1 Dokumen	30,500,000,000	1 Dokumen	31,500,000,000	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah												
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan												
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000,000	2 Dokumen	51,865,000,000	2 Dokumen	57,000,000,000	2 Dokumen	57,500,000,000	2 Dokumen	58,000,000,000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas												
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000,000	1 Dokumen	10,000,000,000	1 Dokumen	11,500,000,000	1 Dokumen	12,000,000,000	1 Dokumen	13,000,000,000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			750,000,000		750,000,000		750,000,000		800,000,000		800,000,000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-		-		-		-	

**Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029**

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	375,000,000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	750,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,250,000,000	1 Unit	1,275,000,000	1 Unit	1,775,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberukulosis	Jumlah orang dengan Tuberukulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			250,000,000		300,000,000		350,000,000		375,000,000		375,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			150,000,000		150,000,000		200,000,000		225,000,000		225,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			25,000,000		35,000,000		45,000,000		50,000,000		50,000,000	
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah talangan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			175,000,000		200,000,000		230,000,000		245,000,000		245,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	325,000,000	
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak												
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan												
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional			150,000,000		250,000,000		350,000,000		365,000,000		365,000,000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	365,000,000	1 Dokumen	365,000,000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna			1,500,000,000		1,650,000,000		1,825,000,000		1,910,000,000		1,910,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			150,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		250,000,000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			150,000,000		200,000,000		275,000,000		285,000,000		285,000,000	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			350,000,000		400,000,000		425,000,000		450,000,000		450,000,000	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	925,000,000	1 Dokumen	925,000,000	

Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025 - 2029

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang kesehatan			105,000,000		300,000,000		385,000,000		420,000,000		450,000,000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2. Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar 3. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar			30,000,000		125,000,000		160,000,000		170,000,000		185,000,000	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	185,000,000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)												
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000		175,000,000		225,000,000		250,000,000		265,000,000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			75,000,000		175,000,000		225,000,000		250,000,000		265,000,000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			85,000,000		120,000,000		150,000,000		185,000,000		220,000,000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan			22,500,000		32,500,000		40,000,000		50,000,000		55,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	32,500,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar			22,500,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		50,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRT P yang memenuhi ketentuan			10,000,000		12,500,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	

**Rencana Strategis Dinas Kesehatan
2025 - 2029**

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu			5,000,000		7,500,000		10,000,000		15,000,000		20,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			5,000,000		7,500,000		10,000,000		15,000,000		20,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah			20,000,000		30,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			20,000,000		30,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan			245,000,000		300,000,000		350,000,000		385,000,000		425,000,000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi dan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor			-		-		-		-		-	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		-		-		-		-	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			145,000,000		180,000,000		205,000,000		225,000,000		250,000,000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	250,000,000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			100,000,000		120,000,000		145,000,000		160,000,000		175,000,000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	175,000,000	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	-4	(05)
1	KARTU BAHAGIA	Pembangunan sistem aplikasi "KARTU BAHAGIA" yang terintegrasi (Bantuan biaya Pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
2	KAMPUNG BAHAGIA	Mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan RT, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi berazaskan kegotongroyongan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
3	CALL CENTER BAHAGIA	(Respon cepat pengaduan masyarakat yang terintegrasi) Penanganan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi dengan memanfaatkan IT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
4	LANSIAR BAHAGIA	Memastikan bahwa para lanjut usia (lansia) dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, nyaman, dan berkualitas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
5	RUMEL	Menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
2.	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	%	13.5	10	9.38	8.75	8.13	7.5	6.88	
3.	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	4	6	5	4	3	2	0	
4.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	76	90	90	90	90	90	90	
5.	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	%	81	90	90	90	90	90	90	
6.	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	36	30	28	26	24	22	20	
7.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98.08	98.2	98.4	98.6	98.8	99	99.2	

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Jambi. Kinerja tersebut adalah kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi yaitu:

Tujuan Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Jambi adalah Peningkatan derajat kesehatan

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran. Untuk mengukur derajat kesehatan sudah meningkat digunakan Indikator Tujuan yaitu Umur Harapan Hidup”.

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup pemerintahan daerah.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Jambi, 2025

Kepala Dinas



Fahmi, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 196702051998031004